

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bulan September 2000 menjadi awal munculnya rencana pembangunan global, yang sering disebut sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs). Rencana itu diikuti oleh pernyataan dari 189 negara. Sudah tiga tahun berlalu sejak tahun 2015, para pemimpin negara di seluruh dunia mengganti rencana pembangunan global MDGs menjadi rencana pembangunan global yang lebih berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (Kannengießer, 2023).

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) muncul dari berbagai upaya global untuk menyelesaikan isu lingkungan dan sosial sejak Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Kemudian, pada KTT Bumi tahun 1992, diambil langkah lebih lanjut berupa Agenda 21. Upaya ini akhirnya memunculkan *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000, terdiri dari delapan tujuan utama, yaitu: mengurangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem, memperluas akses pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta membangun kerja sama global dalam pembangunan. Namun, setelah evaluasi di Konferensi Rio+20 tahun 2012, terlihat bahwa MDGs masih kurang luas dan tidak cukup berkelanjutan. Karena itu, negara-negara anggota PBB sepakat menyusun agenda yang lebih menyeluruh. Proses ini akhirnya menghasilkan Agenda

2030 dan penetapan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015 sebagai arah pembangunan global yang baru (Rizqi, 2023).

SDGs ini memiliki tujuan pembangunan global yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya, yaitu MDGs. SDGs berisi 17 poin tujuan yang tercantum di laman resmi, seperti "tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi terjangkau dan bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, pengurangan ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tindakan menghadapi perubahan iklim, kehidupan di bawah air, kehidupan di darat, perdamaian, keadilan, dan lembaga kuat serta kerja sama untuk mencapai tujuan". Dengan adanya 17 poin ini, negara-negara yang menandatangani kesepakatan SDGs, termasuk Indonesia, diwajibkan melakukan beberapa langkah untuk mencapai target yang telah disepakati bersama (Kannengießer, 2023).

Dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, pemerintah mengelompokkan 17 tujuan pembangunan ke dalam empat pilar utama. Pengelompokan ini digunakan sebagai kerangka kerja agar perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan secara lebih terarah. Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender). Pilar ini menitikberatkan pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan ketimpangan sosial, khususnya yang berkaitan dengan gender dan kelompok rentan (Ningrum *et al.*, 2024).

Selain itu, pilar pembangunan ekonomi juga terdiri dari lima tujuan, yaitu Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), serta Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Pilar ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Fokus utamanya meliputi penyediaan energi yang ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, penguatan sektor industri dan infrastruktur, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan pembangunan (Ningrum *et al.*, 2024).

Selanjutnya, pilar pembangunan lingkungan hidup mencakup enam tujuan, yaitu Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Pilar ini berfokus pada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan dan daya dukung lingkungan, sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan oleh generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Ningrum *et al.*, 2024).

Sementara itu, pilar hukum dan tata kelola hanya mencakup satu tujuan, yaitu Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Meskipun hanya terdiri dari satu tujuan, pilar ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi pelaksanaan seluruh tujuan SDGs lainnya. Pilar ini menekankan penguatan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan partisipasi publik, serta penciptaan stabilitas sosial dan politik. Tanpa kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang baik, pencapaian tujuan dalam pilar sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Ningrum *et al.*, 2024).

Seluruhnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pilar-pilar ini dibagi menjadi 17 tujuan dan 169 target, yang kemudian dijabarkan menjadi 289 indikator untuk mengukur pencapaian. Indikator dan target ini telah diintegrasikan sedemikian rupa sehingga saling terkait satu sama lain untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tidak semua indikator tersedia untuk Indonesia baik di tingkat lokal (kabupaten/kota dan provinsi) maupun nasional (Ningrum *et al.*, 2024).

Berdasarkan *Sustainable Development Report 2025*, skor Indeks *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 70,22 dari skala maksimal 100, sehingga menempatkan negara ini dalam peringkat ke-77 di antara negara-negara di dunia. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai sekitar 70,22% dari seluruh target SDGs yang ditetapkan oleh PBB. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Finlandia memiliki skor tertinggi yaitu 87,02, diikuti oleh

Swedia, Denmark, Jerman, Prancis, Austria, Norwegia, Kroasia, Polandia, dan Ceko. Sejak tahun 2015, Indonesia sebagai anggota PBB telah menerima dan menerapkan agenda SDG yang terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target spesifik. Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan hingga tahun 2030 (Michaela *et al.*, 2025).

Menariknya, tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) berusaha mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara, sementara tujuan lainnya berfokus pada mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuknya (Nogueira, 2000). Pada tahun 2024 di negara-negara berkembang, jumlah penduduk yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem (yang didefinisikan sebagai pendapatan di bawah US\$1,90 per hari) turun dari 1,84 miliar orang pada tahun 1990 menjadi 660 juta orang pada tahun 2019 (Bank Dunia, Tahun 2022). Di sisi lain dalam hal ketimpangan, 10% orang terkaya mendapatkan 52% dari pendapatan global, sementara separuh penduduk yang termiskin hanya mendapatkan 8,5% dari total pendapatan tersebut (Azmeah & Darwich, 2025).

Prinsip utama dari SDGs adalah *leaving no one behind* (tidak meninggalkan satu orang pun), yang menuntut adanya prinsip keadilan, yaitu keadilan procedural. Sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini belum terlibat, dalam proses pembangunan. Keadilan substansial adalah keadilan yang mencakup semua fungsi yang terdapat dalam dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan program pembangunan, tetapi juga memungkinkan adanya penambahan atau perubahan mengenai masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan warga yang tertinggal.

Untuk penerapan prinsip utama ini, terdapat tujuan yang penting yang dikembangkan dalam SDGs ini, yaitu tujuan 10 mengurangi ketimpangan.

Perbedaan distribusi pendapatan antar individu, kelompok, atau wilayah dalam suatu negara tercermin dalam ketimpangan pendapatan. Masalah ketimpangan pendapatan terus menjadi isu struktural yang menantang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional. Menurut studi PBB Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia tahun 2023, beberapa negara mengalami ketimpangan ekonomi yang semakin besar, dengan koefisien Gini yang meningkat sejak merebaknya epidemi dalam tiga tahun terakhir.

Ketimpangan yang bersumber dari ketidaksesuaian akses dan kesempatan ekonomi tidak hanya membahayakan pertumbuhan inklusif tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial (Kurniawan *et al.*, 2023). Laporan Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia (2023) menyoroti bahwa tren peningkatan indeks gini di beberapa negara mencerminkan memburuknya ketimpangan pendapatan. Tujuan 10 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berfokus pada pengurangan ketimpangan, berkaitan langsung dengan hal ini.

Ketidaksetaraan pendapatan bisa dimaklumi sebagai perbedaan penghasilan antar daerah satu sama lain, atau juga sebagai perbedaan penghasilan antar orang dalam satu wilayah. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam sumber daya alam dan faktor produksi di antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan ini, meskipun tidak diinginkan, menciptakan jarak antara daerah yang memiliki sumber daya dan

daerah yang kurang beruntung, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan pendapatan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya (Umi & Kundhani, 2021).

Tujuan 10 dari *Sustainable Development Goals* menekankan pentingnya mengurangi perbedaan penghasilan dan kesempatan dalam suatu negara atau wilayah sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target ini salah satu indikator yang digunakan adalah koefisien gini. Indikator ini tercantum dalam kerangka SDGs sebagai bagian dari target 10.1.1 (Bappenas 2024).

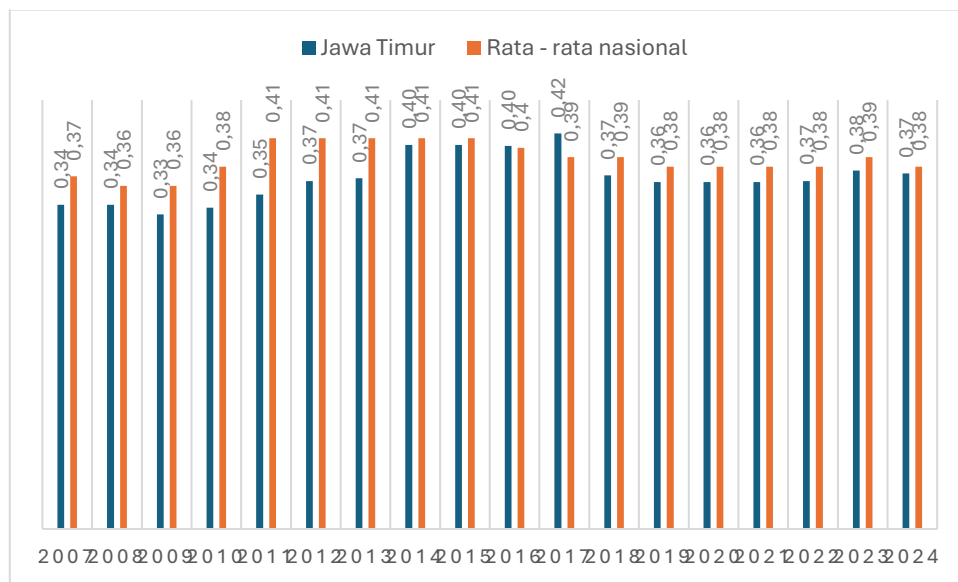
Koefisien Gini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan lebih banyak pemerataan. Oleh karena itu, indikator ini menjadi alat penting untuk menentukan sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh populasi.

Dalam konteks SDG 10, penggunaan koefisien Gini untuk mengukur ketimpangan pendapatan membantu memantau apakah pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat secara adil kepada semua orang, terutama bagi kelompok dengan pendapatan lebih rendah. Penekanan yang diberikan pada penggunaan koefisien Gini sebagai bagian dari target pengurangan ketimpangan menunjukkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan adalah komponen penting dalam pembangunan yang

Di Provinsi Jawa Timur, ketimpangan pendapatan umumnya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan bahwa disparitas pengeluaran penduduk di sini sedikit lebih kecil dibandingkan beberapa provinsi lain. Meski begitu, ketimpangan di Jawa Timur masih perlu dianalisis lebih lanjut, terutama jika dikaitkan

dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial seperti Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah/RLS), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Gambar 1. 1** Perbandingan Gini Ratio Jawa Timur dengan Nasional Tahun 2007-2024



Sumber data : BPS diolah (2026)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan grafik Gini Ratio di Jawa Timur dan nasional berfluktuasi dengan tren naik hingga pertengahan 2010-an, kemudian relatif stabil dan sedikit menurun setelahnya, meskipun masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Pada tahun 2007, Gini Ratio Jawa Timur mencapai 0,34, lebih rendah dibandingkan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,37. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Jawa Timur lebih merata dibandingkan rata-rata nasional. Situasi ini sejalan dengan struktur ekonomi Jawa Timur yang masih didominasi oleh sektor

pertanian dan informal, seperti yang dijelaskan oleh Todaro & Smith (2015), yang mengindikasikan bahwa daerah dengan sektor ini cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan dominasi sektor modern.

Pada tahun 2007, Gini Ratio Jawa Timur mencapai angka 0,34, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional yang sebesar 0,37. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran di Jawa Timur terdistribusi lebih merata dibandingkan rata-rata nasional, pada masa itu masih didorong oleh sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional di daerah pedesaan. Tahun 2008 dan 2009, Gini Ratio Jawa Timur sedikit berubah, berkisar antara 0,34 hingga 0,33, sementara tingkat nasional tetap berada di sekitar 0,36. Stabilitas ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang memengaruhi pendapatan kelompok menengah atas, sehingga ketimpangan tetap tidak meningkat secara signifikan.

Pada tahun 2010 hingga 2012, Gini Ratio Jawa Timur naik dari 0,34 menjadi 0,35, sedangkan tingkat ketimpangan nasional naik lebih besar, dari 0,38 menjadi 0,41. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama masa itu tidak merata. Kelompok orang dengan penghasilan tinggi dan daerah perkotaan mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan kelompok dengan penghasilan rendah dan daerah pedesaan. Akibatnya, perbedaan pengeluaran semakin lebar, terutama di tingkat nasional.

Pada tahun 2013 hingga 2015, indeks Gini Jawa Timur kembali naik sampai mencapai 0,37, sedangkan tingkat nasional tetap tinggi sekitar 0,41. Masa ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi, yang dipengaruhi oleh

perbedaan gaji yang semakin lebar, pertumbuhan kota yang cepat, serta kesulitan para pekerja yang tidak berpendidikan tinggi dalam mendapatkan pekerjaan tetap. Pertumbuhan ekonomi yang banyak terjadi di kota dan sektor tertentu membuat perbedaan kesejahteraan antar kelompok masyarakat semakin jauh.

Pada tahun 2016 hingga 2017, nilai Gini Ratio di Jawa Timur naik dengan cepat sampai mencapai 0,40 hingga 0,42. Angka ini bahkan melebihi rata-rata nasional yang mulai turun ke rentang 0,40 hingga 0,39. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar di dalam Jawa Timur, terutama antara wilayah industri dan perkotaan dengan daerah pedesaan serta wilayah yang pertumbuhan ekonominya lebih lambat. Ketimpangan antar kabupaten/kota menjadi penyebab utama meningkatnya nilai Gini di tingkat provinsi.

Di tahun 2018–2019, Gini Ratio Jawa Timur mulai turun ke angka 0,37–0,38, sesuai dengan kondisi nasional yang berkisar di 0,38. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya keberhasilan program bantuan sosial, peningkatan kemampuan beli masyarakat, serta kenaikan upah minimum yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada 2020–2021, meskipun pandemi COVID-19 membuat aktivitas ekonomi turun, Gini Ratio Jawa Timur tetap stabil di sekitar 0,38, seperti halnya tingkat nasional. Ketimpangan yang tetap stabil tidak berarti ekonomi membaik, melainkan karena pendapatan turun hampir di semua kelompok masyarakat, sehingga distribusi pengeluaran tidak berubah secara nyata.

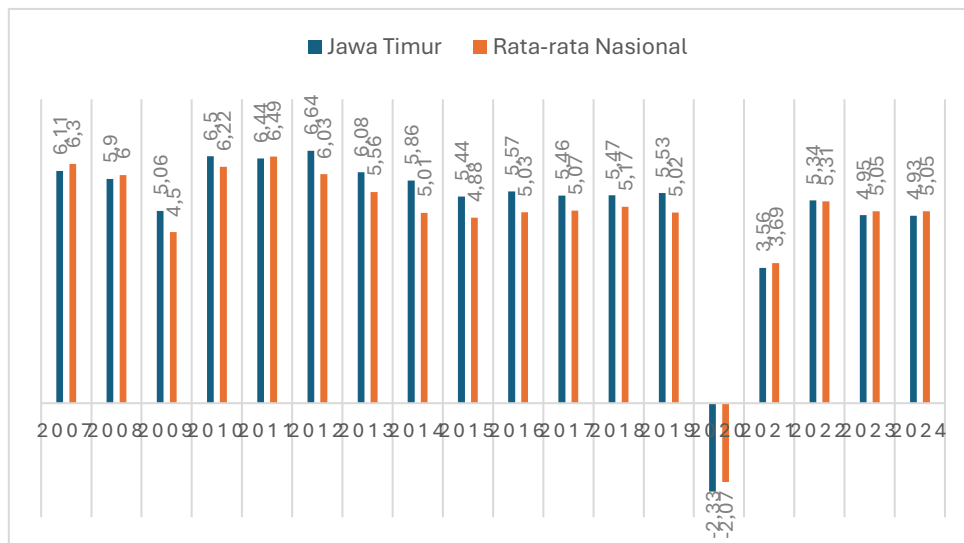
Pada tahun 2022 sampai 2024, Gini Ratio di Jawa Timur tetap pada angka 0,38, sedangkan tingkat nasional sedikit lebih tinggi, berkisar antara 0,38 hingga 0,39. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi belum mencakup semua kalangan. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal masih mengalami kendala dalam mendapatkan pekerjaan berkualitas serta pendapatan yang stabil, sehingga ketimpangan tetap belum berkurang banyak.

Dalam pembahasan ekonomi makro, ketimpangan pendapatan sering dipelajari bersama pertumbuhan ekonomi karena keduanya saling berkaitan dan bisa mempengaruhi kestabilan sosial serta kemajuan pembangunan. Contohnya, data resmi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,03 persen pada tahun 2024, tetapi pertumbuhan yang stabil ini belum sepenuhnya terlihat dalam pembagian pendapatan yang merata, sehingga ada sebagian masyarakat yang belum merasakan manfaat pertumbuhan secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, jika tidak diiringi dengan kebijakan yang memperbaiki distribusi pendapatan dan memperluas akses sosial.

Dengan demikian, konsep pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari laju pertumbuhannya, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesempatan yang luas dan adil bagi semua orang. Kualitas pertumbuhan harus menjadi aspek penting dalam analisis ekonomi makro karena pertumbuhan yang tidak inklusif berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan melemahkan tujuan pembangunan jangka panjang. Ini karena pertumbuhan yang inklusif diharapkan dapat memperluas akses

terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu (Prasetyia, 2021).

**Gambar 1. 2** Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dengan Nasional Tahun 2007-2024



Sumber data : BPS diolah (2026)

Gambar 1.2 diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2007 hingga 2008 yang tumbuh dengan tingkat cukup tinggi dan stabil. Tahun 2007, pertumbuhan mencapai sekitar 6,1 persen, sedangkan pada tahun 2008 sedikit turun menjadi sekitar 5,9 persen. Dalam periode yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 6,3 persen di tahun 2007 dan 6,0 persen di tahun 2008. Keadaan ini menunjukkan bahwa Jawa Timur dan secara nasional masih dalam fase pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi gangguan dari luar. Struktur ekonomi Jawa Timur yang didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian berhasil menjaga pertumbuhan tetap kuat dan sejalan dengan kinerja ekonomi nasional. Namun pada tahun 2009, terjadi perlambatan ekonomi yang cukup parah di kedua

wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur turun signifikan, mencapai sekitar 4,5 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka sekitar 4,6 persen. Penurunan ini menunjukkan dampak nyata dari krisis keuangan global 2008–2009, yang menyebabkan menurunnya permintaan ekspor, penurunan investasi, serta perlambatan kegiatan industri dan perdagangan. Dampak krisis tersebut sangat terasa di Jawa Timur karena struktur ekonominya cukup bergantung pada sektor-sektor yang paling rentan terhadap kondisi ekonomi global (Aida *et al.*, 2020).

Pada periode 2010–2014, ekonomi Jawa Timur mengalami pemulihan yang cukup baik. Tahun 2010, pertumbuhan ekonominya naik lagi hingga sekitar 6,4 persen, dan bahkan mencapai 6,6 persen pada tahun 2011–2012. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar antara 6,1–6,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Jawa Timur terjadi dengan cepat setelah krisis global. Namun, sejak tahun 2013–2014, laju pertumbuhan mulai melambat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur turun menjadi sekitar 5,9–5,8 persen, sesuai dengan perlambatan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian global dan perubahan kebijakan ekonomi dalam negeri.

Pada tahun 2015 hingga 2019, ekonomi Jawa Timur dan ekonomi nasional tumbuh dengan laju yang stabil namun tidak terlalu cepat. Jawa Timur tumbuh antara 5,4 hingga 5,6 persen, sedangkan ekonomi nasional tumbuh antara 5,0 hingga 5,2 persen. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur lebih kuat menghadapi tantangan dibandingkan dengan ekonomi nasional secara keseluruhan. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi yang sangat besar karena adanya pandemi COVID-19. Ekonomi

Jawa Timur turun sekitar  $-2,3$  persen, sedangkan ekonomi nasional turun sekitar  $-2,1$  persen. Setelah itu, mulai dari tahun 2021 hingga 2024, ekonomi kembali membaik secara perlahan. Pada tahun 2021, ekonomi tumbuh kembali positif antara  $3,5$  hingga  $3,7$  persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 hingga 2023 sampai mencapai antara  $5,3$  hingga  $5,9$  persen. Meski demikian, pada 2024 pertumbuhan ekonomi mulai agak melambat. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengikuti dinamika ekonomi nasional, tetapi memiliki daya tahan yang lebih baik pada beberapa waktu tertentu.

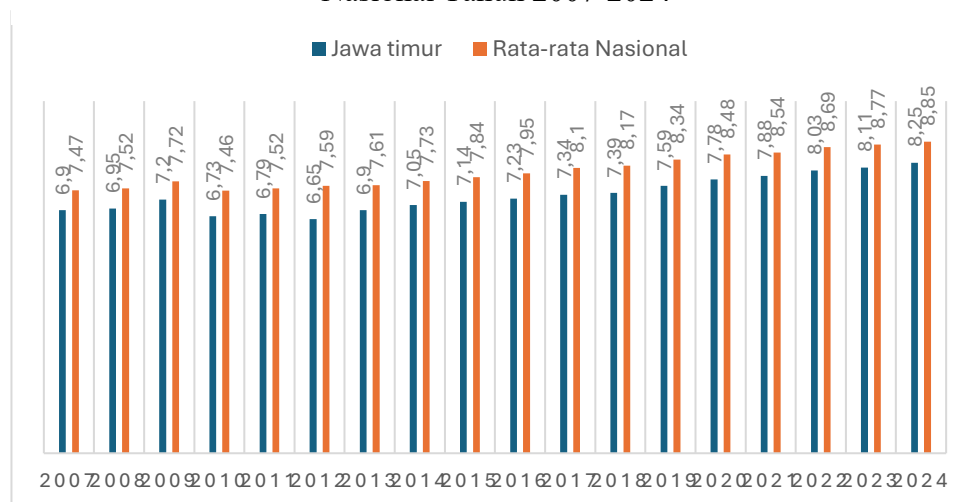
Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif stabil dan mengikuti tren nasional, ini tidak berarti pembangunan berhasil merata di seluruh masyarakat. Dalam studi ekonomi pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi tidak didukung oleh akses yang merata terhadap faktor-faktor produksi, risiko ketimpangan pendapatan akan meningkat (Todaro & Smith, 2020). Salah satu faktor yang memengaruhi proses tersebut adalah pendidikan. Penelitian oleh Handayani & Hanifa (2024) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang berkaitan erat dengan ketimpangan penghasilan, karena perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan perbedaan kemampuan kerja dan hasil yang diperoleh dari bekerja

Pendidikan adalah faktor penting yang memengaruhi perbedaan tingkat pendapatan. Secara nasional, penelitian empiris menunjukkan bahwa manfaat dari pendidikan dan perbedaan tingkat pendidikan memengaruhi ketimpangan upah di Indonesia. Salah satu hasil penelitian nasional dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa perbedaan manfaat pendidikan di berbagai tingkat upah

memperlebar jarak upah antara kelompok yang berpendidikan tinggi dan rendah. Selain itu, penelitian lain yang menganalisis ketimpangan pendidikan dan pendapatan antar provinsi menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan secara positif berkontribusi pada ketimpangan pendapatan nasional dalam periode panel.

Di Jawa Timur, indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun peningkatan ini membawa peluang kerja dan meningkatkan produktivitas, masih ada perbedaan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang bisa memperlebar perbedaan penghasilan. Jika dibandingkan dengan negara secara keseluruhan, Jawa Timur mengikuti tren nasional di mana pendidikan memengaruhi kemudahan bergerak secara ekonomi, tetapi masih butuh kebijakan yang mendorong kesetaraan akses pendidikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua wilayah di provinsi tersebut

**Gambar 1. 3** Perbandingan Rata-rata lama Sekolah Jawa Timur dengan Nasional Tahun 2007-2024



Sumber data : BPS diolah (2026)

Gambar 1.3 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan rata-rata nasional selama masa 2007 hingga 2024. Pada tahun 2007 sampai 2009, rata-rata lama sekolah di Jawa Timur berada antara 6,9 hingga 7,2 tahun, sedangkan rata-rata nasional sedikit lebih tinggi, sekitar 7,0 hingga 7,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Jawa Timur masih kurang dibandingkan tingkat nasional. Peningkatan rata-rata lama sekolah pada masa ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah pertama mulai membaik, meskipun masih ada batasan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Perbedaan antara Jawa Timur dan rata-rata nasional menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan di berbagai wilayah.

Pada tahun 2010 sampai 2014, rata-rata lama sekolah (RLS) di Jawa Timur naik, tapi cukup perlahan. RLSnya mulai dari sekitar 7,3 tahun di tahun 2010, kemudian turun menjadi sekitar 7,0 hingga 7,1 tahun pada 2013 sampai 2014, bahkan sempat terjadi stagnasi. Sementara itu, RLS nasional naik secara konsisten, dari sekitar 7,4 tahun menjadi sekitar 7,8 tahun. Penurunan kecepatan peningkatan RLS di Jawa Timur pada masa ini mungkin disebabkan oleh masih tingginya jumlah orang yang putus sekolah di jenjang menengah serta keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Jika dibandingkan dengan RLS nasional, jarak antara Jawa Timur dan nasional masih cukup besar, menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan di Jawa Timur belum secepat rata-rata nasional (Muvid, 2022).

Selanjutnya pada tahun 2015 hingga 2019, RLS Jawa Timur mulai menunjukkan peningkatan yang lebih teratur, dari sekitar 7,1 hingga 7,6 tahun, sementara RLS nasional naik dari sekitar 7,8 tahun menjadi 8,2 tahun. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan partisipasi dalam pendidikan menengah, didorong oleh kebijakan wajib belajar dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat pendidikan. Namun, RLS Jawa Timur tetap berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tingkat pendidikan di Jawa Timur masih kalah dibandingkan rata-rata Indonesia.

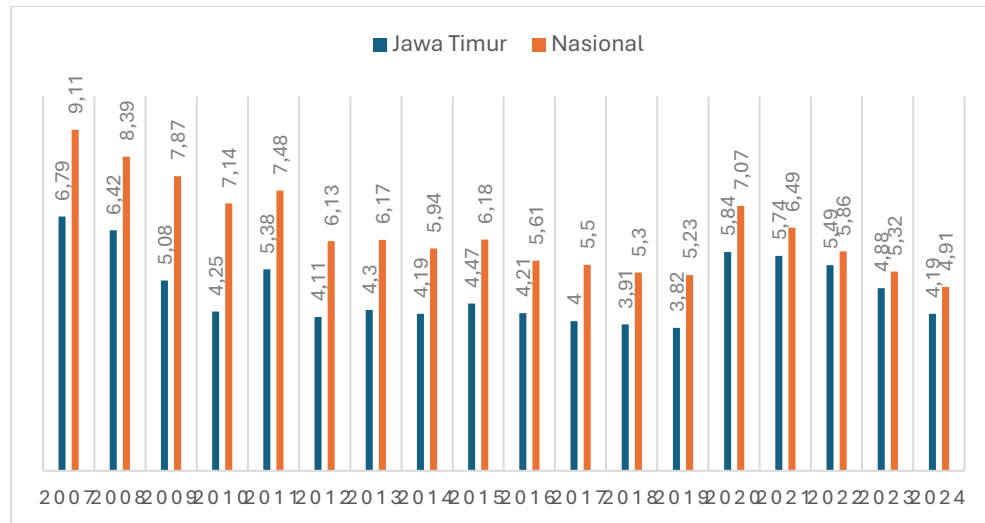
Selama periode 2020 hingga 2024, RLS di Jawa Timur dan secara nasional tetap mengalami kenaikan, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak terlalu cepat. RLS di Jawa Timur naik dari sekitar 7,7 tahun pada tahun 2020 menjadi sekitar 8,2 tahun pada tahun 2024, sedangkan RLS nasional meningkat dari sekitar 8,3 tahun menjadi sekitar 8,8 tahun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam bidang pendidikan secara umum terus meningkat, meskipun masa awal pandemi mungkin memberikan pengaruh negatif terhadap proses belajar secara formal. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa tren RLS Jawa Timur terus naik, namun selalu berada di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan yang masih perlu diperhatikan, terutama dalam upaya memperkuat pendidikan hingga jenjang menengah dan tinggi.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam sebuah studi yang menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan kemungkinan seseorang

menganggur, menggunakan data Indonesian *Family Life Survey (IFLS)*, ditemukan bahwa orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih sedikit risiko menganggur dibandingkan orang dengan pendidikan yang lebih rendah (Dorothy *et al.*, 2025). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas dan durasi pendidikan penting untuk mempersiapkan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi persaingan di pasar kerja. Penelitian yang dilakukan Sidik & Riofita (2025) juga menegaskan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang bisa beradaptasi dan memiliki keterampilan, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran jika pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan keterampilan kerja yang relevan

Kondisi ini cocok dengan situasi di Jawa Timur, di mana meskipun jumlah lulusan sekolah menengah atas terus bertambah, tingkat pengangguran tetap dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dan kebutuhan pekerjaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa angka pengangguran terutama tinggi pada kelompok yang berpendidikan menengah dan tinggi karena ketidaksesuaian kemampuan dengan tuntutan pekerjaan serta keterbatasan lowongan pekerjaan formal yang sesuai. Studi dalam Jurnal Pendidikan Tambusai mengatakan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi besar kecilnya kemungkinan seseorang menganggur, tetapi pengaruhnya sangat tergantung pada sejauh mana pelajaran yang diterima cocok dengan kebutuhan dunia kerja. sehingga ketidaksesuaian antara pendidikan dan permintaan pasar tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran tinggi meskipun rata-rata tingkat pendidikan meningkat.

**Gambar 1. 4** Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dengan Nasional Tahun 2007-2024



Sumber data : BPS diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, terlihat bahwa perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur dibandingkan dengan rata-rata nasional dari tahun 2007 hingga 2024. Pada tahun 2007, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur mencapai sekitar 6,79%, sedangkan tingkat pengangguran nasional lebih tinggi yaitu 9,11%. Tahun 2008, TPT Jawa Timur turun menjadi 6,42%, sementara tingkat pengangguran nasional juga menurun menjadi 8,39%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja nasional maupun daerah setelah masa reformasi struktural. Pada tahun 2009, Jawa Timur terus mengalami penurunan tingkat pengangguran hingga mencapai 5,08%, sedangkan tingkat pengangguran nasional turun ke 7,87%. Penurunan ini dipengaruhi oleh dampak kebijakan fiskal dan moneter yang mulai mengurangi tekanan di pasar tenaga kerja setelah krisis global 2008–2009, sehingga berhasil menurunkan angka pengangguran.

Mulai tahun 2010 hingga 2014, TPT Jawa Timur mengalami perubahan yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2010, TPT menurun menjadi 4,25%, sedangkan angka nasional turun menjadi 7,14%. Tapi di tahun 2011, TPT Jawa Timur naik lagi ke 5,38%, sementara angka nasional tetap tinggi di 7,48%. Dari tahun 2012 sampai 2014, TPT Jawa Timur relatif stabil, berkisar antara 4,11% hingga 4,19%, sedangkan angka nasional berada di kisaran 6,13% hingga 5,94%. Pola ini dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, terutama peningkatan jumlah angkatan kerja dan peralihan dari sektor informal ke formal yang berlangsung perlahan, sehingga angka pengangguran mengalami perubahan yang tidak stabil, meskipun secara umum trennya menurun.

Lalu pada tahun 2015 hingga 2019, jumlah pengangguran di Jawa Timur terus berkurang, dengan angka sekitar 4,47% pada 2015, 4,21% pada 2016, 4,00% pada 2017, dan 3,91% pada 2018. Sementara itu, secara nasional angka pengangguran lebih tinggi, berkisar antara 6,18% pada 2015 hingga 5,30% pada 2018. Penurunan jumlah pengangguran ini terjadi karena berkembangnya sektor industri dan jasa, meningkatnya pekerjaan formal, serta berbagai program pemerintah yang mulai membantu menyerap tenaga kerja. Namun, pada tahun 2019, angka pengangguran di Jawa Timur masih mencapai 3,82%, yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional sebesar 5,23%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren pengangguran sedang menurun, pertumbuhan lapangan kerja di Jawa Timur masih lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

Ada perbedaan cukup besar pada periode 2020–2024. Tahun 2020, karena pandemi COVID-19, Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja (TPT) di Jawa Timur

melonjak hingga sekitar 5,84%, sementara tingkat nasional mengalami kenaikan tajam hingga sekitar 7,07%. Hal ini mencerminkan tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja akibat pembatasan sosial dan penurunan ekonomi. Pada tahun 2021–2022, angka TPT kemudian turun, dengan Jawa Timur berada di kisaran 5,74% hingga 5,49%, sedangkan tingkat nasional berada di 6,49% hingga 5,86%. Perubahan ini sejalan dengan pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan pemulihan sektor informal serta jasa. Selanjutnya pada tahun 2023–2024, TPT terus menurun hingga sekitar 4,83% (2023) dan 4,19% (2024) di Jawa Timur, sementara tingkat nasional juga turun menjadi 5,32% hingga 4,91%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan pasar tenaga kerja masih terus berlangsung. Secara keseluruhan, TPT di Jawa Timur cenderung lebih rendah dibandingkan tingkat nasional selama periode ini, yang menunjukkan bahwa Jawa Timur lebih mampu menyerap tenaga kerja atau memiliki struktur pasar kerja yang lebih stabil dibandingkan rata-rata nasional.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah/RLS sebagai proksi tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka/TPT secara teoritis memengaruhi pencapaian SDGs tujuan 10, yang diukur melalui indeks gini, di mana penurunan gini mencerminkan pengurangan kesenjangan pendapatan. Berdasarkan hipotesis Kuznets dan teori pertumbuhan inklusif, pertumbuhan ekonomi awalnya dapat memperlebar kesenjangan sebelum menurunkannya melalui penyerapan tenaga kerja, sementara RLS meningkatkan produktivitas dan mobilitas sosial untuk pemerataan, dan TPT tinggi cenderung

memperburuk distribusi pendapatan karena mengurangi pendapatan kelompok rentan (Aini & Nugroho, 2023).

Penelitian sebelumnya seperti Aini *et al.*, (2023) menemukan bahwa RLS memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2013-2020, tetapi tidak memeriksa dampak dari ketiga variabel secara bersamaan terhadap indeks Gini sebagai indikator dari *Sustainable Development Goals* tujuan 10 yaitu Pengurangan Ketimpangan. Penelitian Arif (2017) menunjukkan bahwa IPM, yang terkait dengan RLS, berdampak positif terhadap nilai Gini di Jawa Timur (2011-2015), namun tidak mempertimbangkan periode setelah pandemi serta interaksi dengan pertumbuhan ekonomi dan TPT. Kelebihan utama adalah kurangnya analisis data time series dari tahun 2007 hingga 2024 yang menggabungkan ketiga faktor tersebut dalam menilai pencapaian SDGs tujuan 10 di tingkat provinsi, sehingga penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori.

Variabel-variabel tersebut dipilih karena relevansi dengan tujuan SDGs 10, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan pilar ekonomi dalam SDGs. RLS digunakan sebagai proksi dari tingkat pendidikan yang mendukung pemerataan. Sementara TPT berkaitan dengan pekerjaan yang layak. Jawa Timur dipilih karena secara teori memiliki disparitas regional yang tinggi (nilai gini berkisar antara 0.35 hingga 0.40) meskipun pertumbuhannya stabil dan sejalan dengan pertumbuhan nasional. Secara praktis, Jawa Timur juga dipilih karena tersedia data

lengkap dari BPS dari tahun 2007 hingga 2024, yang memungkinkan analisis tren jangka panjang serta memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan menyeluruh.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah hipotesis Kuznets benar dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 10 di wilayah Jawa Timur, serta berkontribusi dalam memperkaya penelitian tentang pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan RLS berdampak negatif terhadap indeks gini, sehingga mengurangi kesenjangan, sedangkan TPT berdampak positif. Model yang digunakan diharapkan mampu menjelaskan 70 sampai 80 persen dari perubahan pencapaian SDGs tujuan 10 selama periode 2007 hingga 2024. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) oleh Bappeda Jatim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Roadmap SDGs melalui upaya seperti pemberdayaan pendidikan vokasi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?

3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### Manfaat Teoritis

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memahami determinan ketercapaian SDGs di tingkat regional.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan terkait analisis pembangunan berkelanjutan di provinsi atau wilayah lain, baik menggunakan pendekatan time series maupun panel data.

#### Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memahami kondisi aktual faktor-faktor yang paling memengaruhi ketercapaian SDGs dan area mana yang masih membutuhkan perhatian.
2. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh paling signifikan, pemerintah dapat merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga upaya percepatan pencapaian target SDGs 2030 dapat dilakukan secara lebih efektif.

#### Manfaat Bagi Instansi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah seperti Bappeda, BPS, dan OPD terkait untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah berjalan dalam mendukung pencapaian SDGs. Temuan mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dapat menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, serta *Roadmap* SDGs Daerah, sehingga perencanaan pembangunan lebih terarah, realistis, dan sesuai kebutuhan daerah.
2. Penelitian ini memberikan informasi empiris yang diharapkan dapat membantu instansi pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, hasil penelitian dapat memperkuat koordinasi antara OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas

Ketenagakerjaan, serta instansi lainnya dalam merancang program lintas sektor guna percepatan pencapaian target SDGs di Provinsi Jawa Timur.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini menelaah pencapaian SDGs tujuan 10 yaitu Pengurangan Kesenjangan yang direpresentasikan oleh ketimpangan pendapatan dan diukur menggunakan Indeks Gini sebagai variabel dependen (Y). Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi variabel tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen (X) seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta tingkat pengangguran. Penelitian ini berfokus pada wilayah Provinsi Jawa Timur dengan periode data selama 18 tahun, serta seluruh data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).